

# Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif

**Samsul Rani**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari

*The purpose of development communication is not just to promote the development and delivery of messages of development, but more important than it is to grow, move, and maintain community participation in development. Communication strategy undertaken to increase community participation in rural development started since the foundation of society analytical skills through education and training so that they are able to recognize the problems and potential of the village, as well as the benefits of development to be done. The community is also involved in the planning, implementation and evaluation of rural development, based on the ability of the community. When this is done, the rural development will be achieved effectively and efficiently.*

**Keywords:** communication strategy, development communication, participation community

*Tujuan komunikasi pembangunan bukan sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi komunikasi yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dimulai sejak peletakan dasar kemampuan analisis masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mereka mampu mengenali permasalahan dan potensi desa, serta manfaat dari pembangunan yang akan dilakukan. Masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, berdasarkan kemampuan masyarakat tersebut. Bila hal ini dilakukan maka pembangunan desa akan tercapai dengan efektif dan efisien.*

**Kata kunci:** strategi komunikasi, komunikasi pembangunan, partisipasi masyarakat

Pembangunan desa telah mendapat perhatian dari pemerintah secara khusus dengan diterbitkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 yang memuat tata kelola pemerintahan desa beserta pembangunan desa. Membangun perdesaan identik dengan modernisasi desa, yaitu proses mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa lebih mendekati kondisi sosial ekonomi masyarakat kota, yang mana desa pada akhirnya akan mengalami dinamika sosial yang lebih cepat sebagai

Email penulis: samsulrani@ymail.com

akibat perkembangan teknologi dan informasi (Wahidi, 2015:15). Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Theresia, 2014:15). Pada dasarnya agenda pembangunan desa harus tumbuh dari inisiatif masyarakat yang bersangkutan, namun harus tetap berada dalam aturan permainan (*rule of the game*) yang telah disepakati secara macro atau secara agregat. Pembangunan desa sebenarnya adalah *self generating aspect* atau adanya kekuatan terpendam atau yang terkandung pada masyarakat yang bersangkutan (*indigenous*) yang perlu didorong untuk berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan (Gani, 2001:292). Dalam pembangunan dikawasan perdesaan lebih dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Theresia, 2014:46).

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari partisipasi, karena pembangunan partisipatif berintikan pada suatu kondisi dimana masyarakatlah yang menjadi aktor utamanya, atau masyarakatlah yang harus memahami sendiri tantangan dan masalah yang dihadapinya dan masyarakat itulah sendiri yang paling utama harus merancang dan melaksanakan upaya dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya. Dengan demikian masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebar dalam beberapa bidang pelaksanaan pembangunan, yaitu a). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 2). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; 3). Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 4). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini;balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi

Desa. 5). Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 6). Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 7). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 8). Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa (Kessa, 2014:21).

Sehubungan dengan itu permasalahan pembangunan dipedesaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat adalah penggalian gagasan, yang mana dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dilakukan melalui musyawarah baik tingkat dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat maupun tingkat desa. Oleh karena upaya penumbuh dan pengembang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, harus dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam praktiknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi pembangunan. Hal inilah yang menjadi fokus dalam pembangunan desa, strategi komunikasi pembangunan yang bagaimana dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan desa dapat tercapai dengan baik.

### **1. Komunikasi Pembangunan Dalam Menumbuhkan Partisipasi**

Tujuan komunikasi pembangunan bukan sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kata lain komunikasi pembangunan merupakan cara untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Komunikasi pembangunan menurut

Nasution (2002:106) adalah meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan. Sedangkan Effendy (2006:92) mengartikan komunikasi pembangunan sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Sehubungan dengan itu Schramm (1964:114) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu 1). menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan nasional, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional. 2). memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas. 3). mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Pentingnya komunikasi pembangunan dalam pembangunan desa mempunyai beberapa peranan untuk pengembangan partisipasi masyarakat. Theresia (2014:212) membagi 4 peranan komunikasi dalam pengembangan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan tumbuh jika masyarakat mengetahui tentang: a). adanya masalah yang sedang dihadapi dan memerlukan upaya pemecahannya, b). adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri, 3). Pentingnya akan partisipasi setiap masyarakat dalam pemecahan masalah tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan, 4). Adanya kepercayaan dalam diri setiap warga masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian setiap kegiatan komunikasi pembangunan harus mampu menyampaikan pesan-pesan informatif dan persuasif yang relevan dengan keempat unsur tersebut, sehingga mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan menjamin terpeliharanya hubungan antar individu.
- b. Menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam komunikasi pembangunan desa harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap masyarakat di dalam proses pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian apa mereka

diharapkan partisipasinya, dan apa bentuk partisipasinya yang diharapkan (tenaga, uang, materi, dan lain sebagainya) dari masyarakat.

- c. Menunjukkan dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi. Ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat terjadi karena mereka tidak cukup memiliki dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu pihak yang berkompeten harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- d. Menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan *input*, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa yang akan mereka peroleh dan rasakan (secara langsung dan tidak langsung).

Kemampuan berpartisipasi dikalangan masyarakat, selain dipengaruhi oleh kejelasan tentang kemanfaatan pembangunan, juga dipengaruhi oleh kondisi atau iklim setempat yang mendorong atau justru menghambat mereka untuk berpartisipasi secara sukarela, terpaksa, atau karena kebiasaan. Sehubungan dengan itu, komunikasi pembangunan tidak hanya selalu dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi sukarela, tetapi dalam hal-hal tertentu (tergantung kepada kondisi masyarakat dan urgensi dari pembangunan yang akan dilaksanakan) komunikasi pembangunan dapat saja diarahkan untuk tumbuhnya partisipasi paksaan (mobilisasi tanpa partisipasi). Dengan demikian komunikasi dalam pembangunan desa bukan hanya sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja tetapi jauh lebih itu, komunikasi harus bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam segala bentuk pembangunan, baik dalam menumbuhkan kesadaran, kemampuan, dan terlibat dalam aktivitas pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

## **2. Strategi Komunikasi Dalam Pembangunan Desa**

Terdapat beberapa jenis atau tipologi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Servaes (2003:238) membagi kedalam 7 tipologi partisipasi, yaitu 1). *Passive participation*, masyarakat hanya diberitahu tentang apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi, 2). *Participation in information giving*, masyarakat hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para peneliti menggunakan kuesioner survei atau pendekatan serupa, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses. 3). *Participation by consultation*, masyarakat diminta pandangan mereka tentang masalah dan solusi, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 4). *Participation for material incentives*, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, menyediakan lahan, material dan lainnya, 5). *Functional participation*, masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok-kelompok untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan terkait dengan proyek atau program pembangunan, keterlibatan tersebut cenderung datang setelah keputusan

besar telah dibuat, karena tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan. 6). *Interactive participation*, masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama, melibatkan metodologi interdisipliner yang mencari beberapa perspektif dan memanfaatkan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk menggali potensi atau penyelesaian permasalahan pembangunan desa, 7). *Self mobilization*, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif independen tanpa melibatkan pihak luar, dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Kemunculan partisipasi masyarakat karena adanya sinergi antara aparat desa, LSM, dan masyarakat (Sulistyowati, 2013:579). Bagaimana menumbuhkan sinergi beberapa pihak tersebut diperlukan sebuah strategi komunikasi. Membuat strategi komunikasi dalam pembangunan desa harus menentukan berapa bentuk atau tahapan keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan. Theresia (2014:199) membagi 4 bentuk keterlibatan masyarakat yaitu 1). partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2). partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3). partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Sedangkan Wilcox (1994:1) membedakan tingkatan atau tahapan partisipasi masyarakat berdasarkan 5 tingkatan:

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
4. Bertindak bersama (*Acting Together*), tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Moseley dan Cherrett (Lowe, 1998:32) mengidentifikasi beberapa alat utama untuk mempromosikan partisipasi dalam program pembangunan desa dan proyek-proyek pembangunan pedesaan. a). *Adult education and training*. Pendidikan orang dewasa dan pelatihan, b). *Public Meetings*. Pertemuan-pertemuan publik untuk mempublikasikan proyek dan menyediakan debat terbuka, c). *Village appraisals*. Penilaian Desa adalah mengidentifikasi masalah dan peluang bersama mereka dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah desa, d). *Media and Telecommunications*. Media dan telekomunikasi untuk penyebaran informasi proyek-proyek pembangunan, e). *Exhibitions dan fair*. Pameran, baik bidang maupun program pembangunan desa.

Berdasarkan pendapat Moseley dan Cherrett, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa strategi komunikasi dalam pembangunan desa dimulai dari pendidikan orang dewasa dan pelatihan. Sehubungan dengan itu dalam perencanaan

pembangunan desa di Indonesia telah menggunakan model *Bottom Up Planning* artinya perencanaan pembangunan dimulai dari keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan melibatkan struktur organisasi paling rendah di dalam masyarakat seperti RT, RW, tokoh masyarakat, LSM dan lainnya yang diwadahi dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Kegiatan Musrenbangdes tersebut menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi hal ini berjalan bukan tanpa masalah, karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan desa hanya sebatas pengetahuan mereka dan yang menjadi aspirasi selalu berhubungan dengan infrastruktur saja, padahal banyak bidang pembangunan desa yang dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal inilah menjadi tantangan dalam komunikasi pembangunan yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sehingga mereka tahu bagaimana cara mengenali masalah-masalah desa dan potensi desa yang dapat diselesaikan dan dikembangkan. Pendidikan dan pelatihan tersebut bisa berupa demonstrasi, *workshop*, *case study*, dan lain sebagainya sehubungan dengan cara memetakan permasalahan desa dan potensi desa.

Alat utama berikutnya adalah pertemuan-pertemuan publik, pertemuan dapat berupa Tatap muka, dialog, ceramah, *forum group discussion*. Pertemuan publik bukan hanya dilakukan dalam level atas saja dalam hal ini hanya pada Musrenbangdes. Pertemuan publik harus dilakukan dalam level bawah yaitu rapat tingkat RT yang dimaksudkan untuk menggali keinginan atau kebutuhan dan permasalahan masyarakat untuk dilakukan pembangunan. Kemudian hasil rapat tingkat RT tersebut disampaikan di pertemuan publik tingkat RW, pada level ini pertemuan publik hanya membuat daftar permasalahan dan keinginan dari RT yang berada di bawah hirarkhinya.

Penilaian desa merupakan alat utama lain dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil dari pertemuan publik ditingkat RT dan RW akan disampaikan di tingkat kelurahan atau desa. Disinilah peran komunikasi sangat diperlukan argumentasi-argumentasi untuk menentukan skala prioritas, bidang pembangunan apa saja yang lebih rasional untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Media dan telekomunikasi untuk penyebaran informasi proyek-proyek pembangunan merupakan alat utama lainnya dalam peningkatan partisipasi. Peranan media dapat dilakukan melalui media massa, surat kabar, tabloid, radio, tv, barang cetakan pamflet, brosur, poster, spanduk dan lainnya, yang berisikan jenis dan bentuk program pembangunan desa yang akan dilaksanakan, manfaat yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat, waktu pelaksanaan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat desa mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya.

Berikutnya untuk menghadirkan interaksi antara masyarakat dengan pengambil kebijakan terhadap bidang atau program pembangunan desa yang sudah disetujui maka diperlukan pameran. Dalam pameran tersebut diperlihatkan maket,

bentuk, program pembangunan desa yang akan dilaksanakan, tentu saja pameran tersebut dikemas dengan sebaik mungkin sehingga masyarakat begitu mudah memahaminya, baik sejauh mana mereka bisa berpartisipasi, dalam bentuk apa saja, bagaimana sistem evaluasinya dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambar keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa, kapan masyarakat dapat terlibat, dalam bentuk apa saja dan siapa saja yang terlibat.

Tools	When?		
	Initial Stage	Development Stage	Implementation Stage
Public Meetings	■	▲	□
Adult Education and Training	□	■	■
Village appraisals	□	■	▲
Exhibitions and Fairs	■	▲	□
Media and Telecommunications	■	▲	▲

  

Tools	Towards Whom?		
	Local Leaders	Organisations/ Interest Groups	General Public
Public Meetings	■	■	■
Adult Education and Training	□	■	■
Village appraisals	□	■	▲
Exhibitions and Fairs	■	■	■
Media and Telecommunications	■	■	■

  

	Local Leaders
<i>Key factor</i>	■
<i>Partial factor</i>	▲
<i>Very limited factor</i>	□

Sumber: Moseley dan Cherrett

**Penutup**

Komunikasi pembangunan tidak hanya dimaksudkan menyampaikan program-program pembangunan, tetapi juga sebagai menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik, apabila melibatkan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Begitupula dengan pembangunan desa, peran komunikasi sangat penting khususnya meletakkan dasar partisipasi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan masyarakat akan lebih memahami permasalahan desa, potensi desa, dan manfaat pembangunan, sehingga menumbuhkan partisipasi yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan desa sehubungan dengan bentuk komunikasinya dapat melalui beberapa jenis tahapan pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Apabila komunikasi pembangunan tersebut dilakukan dengan baik maka partisipasi masyarakat dapat dipastikan akan lebih baik pula.

## Referensi

- Gany, Radi A. 2001. *Menyongsong Abad Baru Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*. Hasanuddin University Press. Makassar.
- Lowe, Phillip, dkk. 1998. *Participation In Rural Development: A Review Of European Experience*. Research Report. University Of Newcastle.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah*. Ed. 2, LP3ES. Jakarta.
- Serves, Jan. 2003. *Communication For Development And Social Change*. UNESCO. Paris.
- Sulistiyowati, Fadjarini dan Candra Rusmala Dibyorin. 2013. *Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa*. Jurnal Komunikasi ASPIKOM. Vol. 2. Nomor 1. Halaman 579.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Wahidi, Roestanto. 2015. *Membangun Perdesaan Modern*. Gajah Hidup. Jakarta.
- Wilcox, David. 1994. *Community Participation and empowerment: Putting Theory Into Practice*. RRA Notes (1994), Issue 21, pp.78–82, IIED London.